

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2013 - 2018

DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Nyi Ageng Karang Karanganyar Telp. (0271) 495925, 495141 Fax. 494705

Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : dishubpkp@karanganyarkab.go.id

Kode pos : 57711



KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018 yang menjadi pedoman seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), maka Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018.

Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Bupati terpilih periode 2013-2018 untuk urusan Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 5 tahun kedepan, sehingga keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar yang diuraikan secara detil dalam matrik Program dan Kegiatan tahunan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar 2013 - 2018, saya ucapkan terima kasih.

Karanganyar, 16 Januari 2018

Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar

SUNDORO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610512 198812 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM	I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARANGANYAR	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD.....	II-1
2.2 SUMBER DAYA OPD	II-6
2.3 KINERJA PELAYANAN OPD	II-11
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD	II-11
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD	III-1
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	III-2
3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-7
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 VISI DAN MISI OPD.....	IV-1
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD	IV-2
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	IV-4
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATA, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	V-1
5.2 INDIKATOR KINERJA	V-2



BAB VI	INDIKATOR KINERJA DKP YANG MENGACU PADA TUJUAN	
	DAN SASARAN RPJMD	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Daftar Perlengkapan DishubPKP Kabupaten Karanganyar	II-8
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.....	IV-3
Tabel 4.2	Tujuan ,Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.....	IV-5
Tabel 5.1	Review Renstra Dishub PKP Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 – 2018	V-3
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar	VI-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DISHUBPKP Kabupaten Karanganyar ... II-5



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Baperlitbang), sedangkan penyusunan Renstra-OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang perhubungan perumahan dan kawasan permukiman. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu perhubungan perumahan dan kawasan permukiman yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.



Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD.

Kabupaten Karanganyar saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - 2018 (Perda No. 02 Tahun 2014).

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;



- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
- 13) Perda No. 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2013 – 2018.

Adapun penyusunan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar adalah untuk :

- Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar.
- Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2013 – 2018.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi guna mencapai kinerja yang optimal serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b. Menyusun penilaian kinerja tahunan (LAKIP);
- c. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar tahun 2013 – 2018 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan OPD mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
- Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, Strategi dan Kebijakan OPD.
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- Bab VII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KARANGANYAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang meliputi perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta kesekretariatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang meliputi perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman bidang pertanahan serta kesekretariatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta kesekretariatan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perhubungan membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan Terminal;
 - b. Seksi Prasarana Perhubungan;
 - c. Seksi Pengelolaan Parkir.



4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan membawahkan :
 - a. Seksi Pengujian Kendaraan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - c. Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas.
5. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman membawahkan :
 - a. Seksi Pertanahan;
 - b. Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman;
 - c. Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar.

a. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasana permukiman;
5. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasana permukiman;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;



3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi;
4. Pengkoordinasian tatalaksana;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan advokasi hukum;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
8. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.

- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hokum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

- c. Kepala Bidang Perhubungan.

Kepala Bidang Perhubungan mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan taknis bidang perhubungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perhubungan terdiri dari Seksi Pengelolaan Terminal, Seksi Prasarana Perhubungan dan Seksi Pengelolaan Parkir yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan:

1. Kepala Seksi Pengelolaan Terminal

Kepala Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pengelolaan terminal.



2. Kepala Seksi Prasarana Perhubungan
Kepala Seksi Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana perhubungan.
 3. Kepala Seksi Pengelolaan Parkir
Kepala Seksi Pengelolaan Parkir mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan parkir.
- d. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang lalu lintas angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi
1. Penyusunan kebijakan teknis bidang lalu lintas angkutan jalan;
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas angkutan jalan;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari Seksi Penguji Kendaraan, Seksi Pengendalian dan Operasional dan Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
1. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan
Kepala Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pengujian kendaraan.
 2. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional
Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan operasional.
 3. Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas
Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang analisis dampak lingkungan lalu lintas.



e. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari Seksi Pertanahan, Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman dan Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1. Kepala Seksi Pertanahan

Kepala Seksi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pertanahan.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

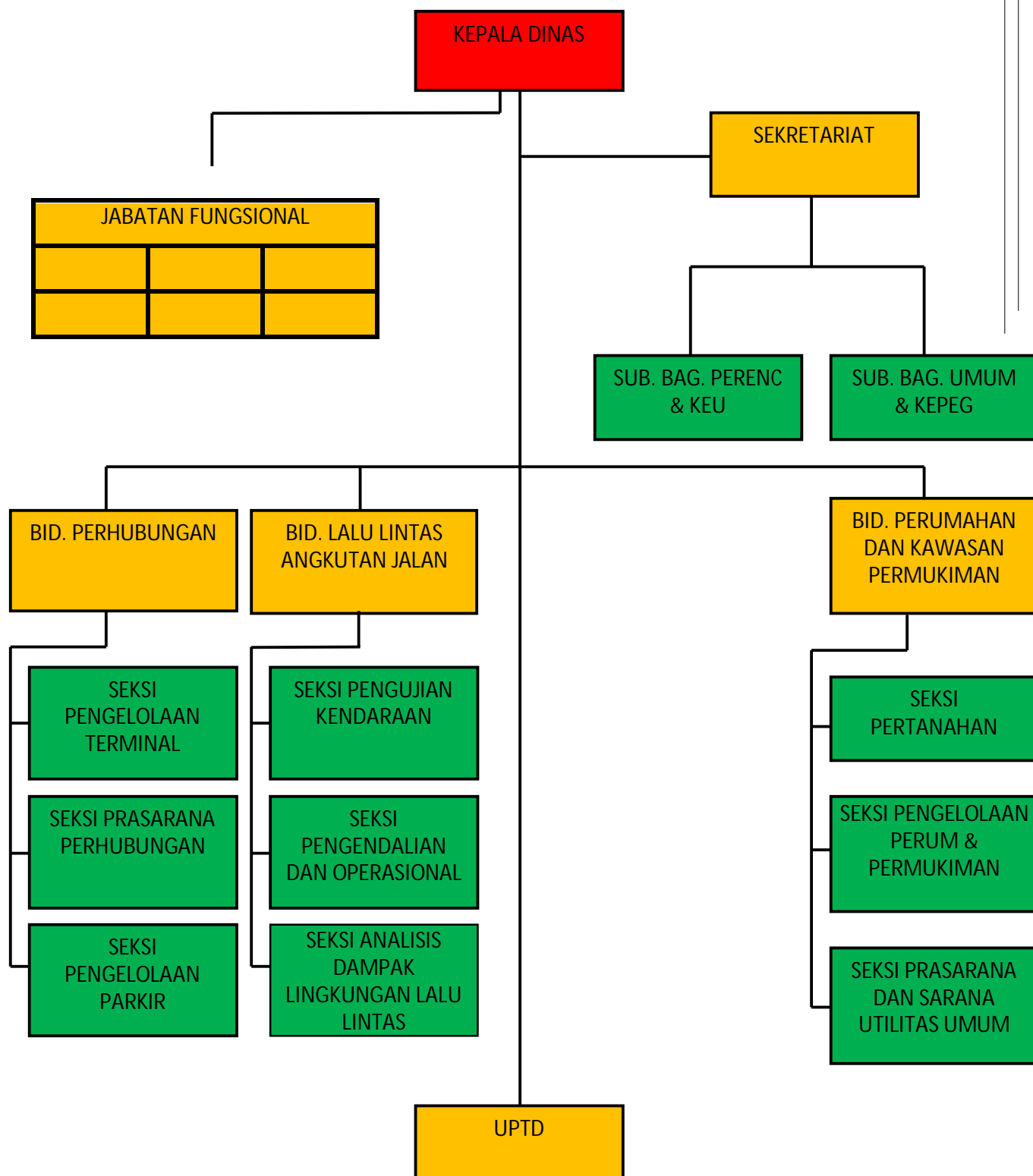
Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan perumahan dan permukiman.

3. Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum

Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana prasarana utilitas umum.



Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar :



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dishub PKP Kabupaten Karanganyar

Dasar Hukum : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.



2.2 Sumber Daya OPD

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2017 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar memiliki data personil PNS dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia sebanyak 211 orang, dengan perincian sebagai berikut :

1. PNS : 92 Orang

Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pangkat/Golongan yaitu :

- a) PNS Golongan I : 10 Orang
- b) PNS Golongan II : 44 Orang
- c) PNS Golongan III : 30 Orang
- d) PNS Golongan IV : 8 Orang

2. Tenaga Harian Lepas / Non PNS : 116 Orang

Jumlah Tenaga Harian Lepas berdasarkan Fungsinya yaitu :

- a) Sekretariat : 13 Orang
- b) Bidang LLAJ : 23 Orang
- c) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman : 38 Orang
- d) Bidang Perhubungan : 42 Orang

Adapun Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5	6
Kepala Dinas	1				
Sekretaris		1			
Kepala Bidang		3			
Kasubag/Kasi			11		
JFU				84	
JFK	-	-	-	-	
Total					100



2. Menurut Golongan :

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol I	Total
1	2	3	4	5	6
Kepala Dinas	1				
Sekretaris	1				
Kepala Bidang	3				
Kasubag/Kasi	2	9			
JFU		28	42	14	
JFK	-	-	-	-	
Total					100

3. Menurut Tingkat Pendidikan :

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana/ D-4	Sarjana Muda	SMA/SM K/ STM	SMP/ ST	Total
1	2	3	4	5	6	7
Kepala Dinas	1					
Sekretaris	1					
Kepala Bidang	3					
Kasubag/Kasi	4	7				
JFU	2	17	6	38	15	
JFK	-	-	-	-	-	
Total						100

4. Menurut jenis kelamin :

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4
Kepala Dinas	1		
Sekretaris	1		
Kepala Bidang	3		
Kasubag/Kasi	11		
JFU	71	13	
JFK	-	-	100
Total			



b. Sumber Daya Lainnya

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

**Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar**

NO	NAMA BARANG	SATUAN
I	Barang Tak Bergerak	
1	Tanah/Bangunan Terminal/kantor/lapangan	12
2	Gedung Kantor Permanen	18
3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4
4	Tempat Ibadah Permanen	3
5	Ged.Pertokoan/Kop/Ps	7
6	Bangunan Ged. Pertokoan Lainnya	1
7	Ged. Pos Jaga	3
8	Ged Grs/Pool Sp	3
9	Halte Bus	3
10	Ged.Ter/Pelab/Band.P	11
11	Bang.Ged.Ter/Pelab/bandar lain	23
12	Bang.pengujian kelaikan Lain	4
13	Ged.tmp.kerja lainnya	3
14	Bangunan Menara Radio	1
15	Monumen	
	- Tugu Pembangunan	1
	- Tugu / Tanda Batas	1
	- Traffic light	6
	- Lampu flashing	2
	- Rambu	10
	- Traffic cone	25
	- RPPJ	2
II	Barang Bergerak	
1	Alat – alat Angkutan	
	- Station wagon / pick up / lainnya	8
	- Sepeda Motor	18
2	Alat angkut non motor	
	- Gerobag Dorong	29
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Mesin Tik Man (11-13)	7
	- Mesin Tik Man Long (18)	3
	- Almari Besi/Metal	12
	- Rak kayu	2
	- Filing Besi /Metal	16
	- Buffet	2
	- Papan pengumuman	12
	- Papan tulis/white board	2
	- Peta	1
	- Display	1
	- Lemari Kayu	5
	- Rak kayu	3
	- Meja Kayu/Rotan	1
	- Kursi Besi /metal	10



- Meja tulis	27
- Meja Panjang	5
- Meja Bundar	1
- Kursi Tamu	8
- Kursi Putar	4
- Kursi biasa	50
- Bangku tunggu	1
- Kursi lipat	50
- Meja Komputer	13
- Meja ½ Biro	20
- Sofa	1
- Mebelair lainnya	4
- Lampu Lalu lintas	1
- Alat pembersih lainnya	1
- Lemari Es	2
- AC Unit	13
- Kipas Angin	23
- Televisi	3
- Cassete Recorder	1
- Amplifier	3
- Loudspeaker	2
- Wireless	1
- Megaphone	2
- Microphone	12
- Unit Power Supply	20
- Camera Film	11
- Handy cam	4
- Komputer unit/jaringan lainnya	4
- PC Unit	40
- Lap top	12
- Notebook	7
- Harddisk	12
- Printer	20
- CPU	1
- Monitor	3
- Meja Kerja Pejabat Eselon III + II	10
- Mobile File	2
- Pesawat telepon PABX	1
- Faximile	1
- Generating set portable	3
- Pompa Air	2
- Lain (ac mobil AD 87 F)	1
- Alat Pengukur kegelapan kaca	2
- Alat Ukur Universal (GPS)	6
- Alat pengukur garis tengah	1
- Alat ukur ban	2
- Alat ukur lainnya	1
- Alat penghancur kertas	1
- Over head Proyektor	2
- Pengukur dimensi	1
- Alat pengukur angka dan kotak segel	1
- Alat penunjuk arah	2
- Meja Panjang	5
- Meja Pelayanan Perijinan	1
- Kursi Rapat	120
- Korden	1
- Mesin Penghisap Debu	1
- Mesin pemotong rumput	1



- Dipenser	3
- Handycam	3
- Alat pemadam Portable	12
- Suku cadang perangkat computer	1
- Personal komputer lainnya	5
- Tablet	3
- Scanner	1
- Managable swich	1
- Camera attachment	6
- Amplifier horn	1
- Power amplifier	2
- Talkshow desk	1
- Build up prosesor	1
- Mixer	1
- Peredam ruangan	1
- Off air monitor	2
- Video monitor cctv	1
- Power suply	1
- Tripot camera	2
- Lensa camera	2
- Saound system	2
- Tape recorder	2
- Handy Talky	12
- Intercome	1
- Unit Pemancar Vhf/FM	3
- Switches/menara antena/Spanner	2
- Memory camera foto	2
- Memory video	1
- Batery handycam	1
- Ac Floor Standing	1

Sumber : DISHUB PKP Kab. Karanganyar TA. 2017

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) yaitu :

- a. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota
- b. Tersedianya Halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
- c. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
- d. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) pada jalan Kota dan jalan di luar kota kabupaten;
- e. Tersedianya unit Pengujian Kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji;
- f. Tersedianya SDM di bidang terminal;
- g. Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;



- h. Tersedianya SDM di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir;
- i. Tersedianya pengembang perumahan;
- j. Tersedianya infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkualitas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar antara lain :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi karena peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi maka perlu pelayanan transportasi jarak dekat dan jauh yang baik dan nyaman;
- b. Memenuhi kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas yang berhubungan dengan kemacetan ,maka dibutuhkan pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintas karena panjang jalan yang tetap dan dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya;
- c. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain;
- d. Masih banyaknya persimpangan Kereta Api sebidang yang tidak terjaga dan belum ada tanda alat peringatan lewatnya KA yang memadai;
- e. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan;



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Kriteria Kota adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi seluruh warga masyarakat. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan kaitannya dengan transportasi semakin banyak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada.

Sebagai Dinas yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, maka Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada. Hal tersebut disebabkan karena usia sarana dan prasarana pengujian yang sudah berumur tua dan sudah sering rusak. Sehingga memerlukan perawatan dengan biaya yang cukup besar
- b. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas sehingga perlu adanya sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- c. Kemacetan lalu lintas kota banyak terjadi pada semua ruas-ruas jalan pada saat liburan panjang.
- d. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya
- e. Tidak seimbang jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan.
- f. Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Karanganyar.
- g. Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena masalah perumahan dan permukiman ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah.



- h. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas ruang terbuka hijau akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, Visi Pembangunan Kabupaten Karanganyar dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah **“Bersama Memajukan Karanganyar”**. sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Karanganyar bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Karanganyar agar lebih sejahtera. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Bersama

Bersama merupakan suatu kata yang dapat dimaknai: (1) sebagai sebuah ajakan; atau (2) sebagai kumpulan lebih dari 1 (satu) orang, kelompok atau ormas saja, tetapi mencakup semua pihak yang ada di Kabupaten Karanganyar, maupun pihak lain/di luar yang bersedia turut serta memajukan Karanganyar; (3) Kata “Bersama” dalam konteks governance dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah membantu kemampuan warga masyarakatnya secara inklusif, tanpa diskriminasi. Artinya, suatu proses dimana pemerintah, lembaga privat atau dunia usaha, masyarakat sipil, organisasi masyarakat, saling berinteraksi untuk mendefinisikan, menyetujui, dan memutuskan tujuan mereka tentang: nilai-nilai umum yang akan dijadikan pedoman, bentuk organisasi pengelolaan, jenis sumber daya dan seperangkat tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang terpilih; melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders), komponen dari tata kelola pemerintahan yang demokratis (democratic/participative governance) secara akuntabel (mencakup unsur transparansi, integritas, responsibel, responsif).

Stakeholders di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi/forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga diperintah oleh nilai-nilai masyarakat,



tradisi informal, praktikpraktik yang disepakati publik sebagai sesuatu yang berguna bagi semua kelompok tanpa diskriminasi. Konsep “bersama” dalam konteks visi misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2014-2018 diterjemahkan sebagai kondisi kebersamaan dalam keragaman membangun tata kehidupan masyarakat yang maju, terukur dalam sasaran: (1) Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama; (2) berkembangnya budaya saling menghormati, tertib dan disiplin ; (3) Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

b. Memajukan

Kata memajukan berasal dari kata maju. Maju dimaknai dari penjabaran misi atau prioritas program bupati dan wakil bupati terpilih. Maju dalam arti menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Suatu masyarakat dikatakan makin maju apabila sumberdaya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan memiliki kualitas pendidikan yang baik serta dapat menjamin eksistensi kehidupannya di masa datang. Kemajuan ini tidak mungkin terwujud dan terlaksana tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar.

Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Keaktifan masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Tetapi semua itu harus dilakukan dalam satu koridor demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai. Perwujudan makna maju ditunjukkan dalam sasaran daerah yang hendak dicapai dalam 2014-2018, yaitu: (1) penambahan persentase cakupan kondisi infrastruktur menyeluruh (prasarana produksi dan distribusi ekonomi, transportasi, koneksitas antar wilayah, dan prasarana pelayanan publik) dalam kriteria baik; (2) peningkatan nilai produksi ekonomi masyarakat dan penurunan angka pengangguran; (3) angka pendidikan rata-rata penduduk meningkat; (4) angka derajat kesehatan penduduk meningkat; (5) Indeks Pembangunan Desa meningkat dalam hal kecukupan infrastruktur, kelembagaan pelayanan publik, produktivitas ekonomi, kelestarian adat budaya; frekuensi dan ragam jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (6) kondusivitas masyarakat meningkat; lebih aman, rendah konflik, rendah



pelanggaran K3; (7) bukti karya masyarakat yang dibangun secara gotong-royong bertambah jenis dan volumenya, pertumbuhan penyelenggaraan event budaya adat Karanganyar.

c. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua wilayah bukan hanya satu atau dua daerah tertentu, tetapi oleh semua penduduk di Kabupaten Karanganyar.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

a. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.

Pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan tata ruang daerah. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh ini dalam konteks mewujudkan peningkatan pelayanan umum (public service) meliputi peningkatan dasar, infrastruktur sosial ekonomi dan infrastruktur pemerintahan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi serta merupakan aspek penting dalam peningkatan pelayanan publik. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi daerah dan penyediaannya yang merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman antara lain air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, guna meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan publik diperlukan dukungan sarana dan prasarana pemerintahan berupa perkantoran dan sarana kerja, serta dukungan manajemen yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu bahkan pengungkit pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan yang terjadi



antar kawasan diakibatkan oleh kesenjangan dalam ketersediaan infrastruktur. Untuk memantapkan penyediaan infrastruktur ke depan di Kabupaten Karanganyar akan dilakukan pendekatan berbasis wilayah, agar pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi biaya besar akan difokuskan pada pengembangan wilayah sektor unggulan dan sektor prioritas.

b. Menciptakan 10.0000 Wirausahawan Mandiri.

Berkurangnya pekerjaan pada perusahaan mengakibatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak tertampung, padahal fenomena ini setiap tahun meningkat. Maka untuk mengurangi angka pengangguran perlu ditumbuhkan semangat untuk berusaha mandiri disamping untuk diri pribadinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Usaha mandiri dapat dilakukan di beberapa sektor : pertanian peternakan, jasa dan lain sebagainya. Maka peran pemerintah untuk menciptakan wirausahawan mandiri dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan teknologi tepat guna, pemasaran dan bantuan stimulan sebagai modal awal untuk membuka usaha. Peningkatan produktivitas yang berdaya saing, pendapatan dan daya beli masyarakat, perlu dilakukan melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, menumbuhkan etos wirausaha serta memberikan peluang dan akses pasar sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Perekonomian suatu daerah akan maju dan berkembang apabila daerah tersebut mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya manusia, sumber daya alam dan sumberdaya buatan yang ada berupa asset daerah secara produktif.

Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.

c. Melaksanakan Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis.

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan maka dengan kebijakan adanya wajib belajar bagi masyarakat, maka pemerintah dapat memberikan pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah/gratis.



Demikian pula halnya dengan pelayanan kesehatan, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

Misi ini menyiratkan strategi akan selama lima tahun, yaitu : (1) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan pendidikan dengan mengembangkan manajemen dan sistem yang mampu mengakses seluruh anak usia sekolah mulai dari pendidikan usia dini (pra sekolah), sekolah dasar dan sekolah lanjutan, mendorong minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang pendidikan tinggi serta mengembangkan model-model pendidikan kejuruan yang langsung menghasilkan mutu kelulusan yang mampu terserap di pasar kerja. Selain itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan terus didorong untuk meningkatkan kemampuan produktivitas masyarakat; (2) Peningkatan derajat dan jangkauan pelayanan kesehatan dengan mengembangkan manajemen dan sistem yang mampu memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk pelayanan kesehatan yang cepat, murah dan terjangkau sehingga mampu menciptakan masyarakat Karanganyar yang sehat, cerdas dan produktif, (3) Peningkatan peranan wanita mengingat peranan wanita memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas hidup mulai dari peranan kodratinya sampai pada partisipasi gender dalam proses perubahan sosial dalam suatu proses pembangunan bangsa, (4) Pembinaan dan pengembangan kapasitas generasi muda dilakukan dengan mengembangkan manajemen yang mampu mendorong kreatifitas, inovasi, kerja keras, serta keimanan dan ketakwaan segenap potensi kepemudaan sehingga mampu melahirkan generasi muda yang tangguh, profesional dan mandiri.

d. Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan.

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus digalakkan dari desa, tersedianya sumberdaya aparat yang baik, serta terciptanya persatuan dan kesatuan kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pembangunan di Kabupaten Karanganyar, maka pengembangan sektor prioritas, sektor unggulan dan sektor pendukung harus dilakukan secara sinergis di suatu desa sebagai satuan wilayah pengembangan, sehingga wilayah tersebut dapat berkembang secara pesat, dapat memberikan sumbangan untuk mendorong percepatan pembangunan Karanganyar terutama terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi.



Ini membutuhkan sumberdaya manusia yang mampu mendesain langkah-langkah strategis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan mengelola potensi yang ada, program dan regulasi yang tepat, membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta membuka akses marketing melalui promosi tentang potensi yang dimiliki desa, maka dengan sendirinya sektor-sektor potensi tersebut akan berkembang dengan pesat.

Apabila potensi ekonomi daerah tersebut dapat dikelola dengan baik, maka akan menahan aliran uang yang berputar disuatu daerah, selain itu apabila daerah tersebut dapat menghasilkan lebih untuk di ekspor ke luar daerah, maka dengan sendirinya akan menambah jumlah aliran uang yang beredar didaerah tersebut. Dengan semakin banyak uang yang beredar maka akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan membuat masyarakat memiliki pendapatan dan dapat meningkatkan daya beli serta kemampuan membayar pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah.

e. Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya.

Perbedaan keyakinan bukan menjadi keretakan memudarnya kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmatan yang harus disyukuri. Hal ini akan menimbulkan rasa saling hormat menghormati. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya maka akan dapat menumbuhkembangkan semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan.

Ke 5 (lima) misi tersebut menjadi fokus atau prioritas kemajuan Karanganyar. Kemajuan ini tidak mungkin terwujud dan terlaksana tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar.

3.3. Penentuan Isu – isu Strategis

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagi kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik



Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perhubungan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam kegiatan di bidang perhubungan di Kabupaten Karanganyar.
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
- c. Masalah pelayanan perparkiran yang tertib dan aman.
- d. Program-program kegiatan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas. Guna mengurai kemacetan.
- e. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / penggantian.
- f. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- g. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar.
- h. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

7.1 Visi dan Misi OPD

7.1.1 Visi

Rumusan visi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar ditetapkan setelah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, dan memperhatikan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2018. Visi OPD juga hendaknya mencerminkan dan merujuk pada Visi Pemerintah Daerah yang menaungi. Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2018 adalah *”Bersama Memajukan Karanganyar”*. Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar tersebut, maka Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar menentukan Visi tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Sistem Transportasi Perhubungan Yang Memadai Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Aman Nyaman dan Ramah Lingkungan”

Visi ini akan menjadi arah dan panduan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya.

7.1.2 Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar agar VISI yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai dengan hasil yang baik dan tepat guna.

Untuk mewujudkan visi tersebut agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar mempunyai MISI sebagai berikut :

1. Meningkatkan kondisi Lalu Lintas yang aman, tertib dan terkendali;
2. Menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;
3. Menyediakan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
4. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah;
5. Meningkatkan fasilitas perumahan yang berkualitas dan terjangkau sebagian kebutuhan dasar masyarakat.
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman;
7. Meningkatkan tertib pertumbuhan perumahan dan permukiman sesuai persyaratan;
8. Mendorong memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak;



9. Meningkatkan Profesionalisme aparat Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2014 - 2018) OPD

4.2.1. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Dengan memperhitungkan hasil analisis sebagaimana dibahas dalam BAB III diatas maka tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Terwujudnya kinerja pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang jasa pelayanan transportasi darat.
- b. Terwujudnya ketersediaan fasilitas perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkualitas.

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Dimana sasaran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penjabaran dari masing –masing tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 1(satu) tahunan selama periode pencapaian tujuan yaitu 5 (lima) tahun. Sasaran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah yang sifatnya menyeluruh, yang mencakup keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan



Permukiman Kabupaten Karanganyar. Secara menyeluruh sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun 2013 - 2018 oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar meliputi :

1. Tercapainya Sarana Prasarana Penunjang Lalu Lintas Untuk Mendukung Kelancaran Lalu Lintas
2. Tercapainya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang jasa pelayanan transportasi darat	Tercapainya Sarana Prasarana Penunjang Lalu Lintas Untuk Mendukung Kelancaran Lalu Lintas	Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan pada Lalu Lintas	2%	4%	6%	8%	9%
2.	Mewujudkan ketersediaan fasilitas perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkualitas	Tercapainya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Prosentase Rumah Tidak Layak huni (RTLH) yang ditangani	60%	70%	80%	90%	100%
			Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11,50%	12%	13%	14%	15%

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun strateginya. Strategi ini meliputi penetapan kebijakan dan program. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar dan rambu-rambu penting dalam menyusun program dan kegiatan. Dimana program adalah merupakan suatu kemampuan dari berbagai kegiatan, usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas hanya akan dapat dicapai apabila Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar menyusun dan melaksanakan strategi yang tepat. Hasil analisis yang baik dan akurat sangat menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dan dukungan data yang relevan adalah persyaratan bagi ketepatan strategi ini. Adapun strategi pembangunan Dinas Perhubungan



Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat diformulasikan pada analisa matrik SWOT sebagai berikut :

		KEKUATAN	KELEMAHAN
Faktor Internal		Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar	SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
Faktor Eksternal		Tersedianya fasilitas pengendali traffic light secara terpadu dengan menggunakan ATCS	Peralatan yang dimiliki sekarang ini sangatlah terbatas jumlahnya dan belum maksimal
		Tersedianya fasilitas monitoring lalu lintas yang terpusat dengan menggunakan CCTV	Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki
		Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor	Gedung pengujian yang digunakan saat ini sudah tua dan memerlukan perawatan yang memakan biaya cukup tinggi tiap tahunnya
		Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peralatan pengujian yang digunakan saat ini sudah cukup berumur sehingga memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi
PELUANG	Letak geografis Kabupaten Karanganyar yang berada di kaki gunung Lawu sehingga banyak menjadi tujuan wisata saat ini	Mampu meningkatkan kualitas serta profesionalisme Aparatur Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan	Pelayanan kepada masyarakat harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan agar dapat meminimalisir kekecewaan masyarakat akibat pelayanan yang tidak cepat, tepat dan lengkap
	Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten Karanganyar baik di desa maupun perkotaan		
TANTANGAN	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor belum maksimal yang diindikasikan dengan sudah mulai berumurnya peralatan-peralatan yang digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor serta belum tercukupinya tenaga teknis penguji ;	Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah.	Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem pasarana lainnya
	Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi pada saat liburan ataupun long weekend sehingga menambah kemacetan diberbagai ruas jalan ;		
	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan ;		



Pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	<i>Terwujudnya Sistem Transportasi Perhubungan Yang Memadai Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Aman Nyaman dan Ramah Lingkungan</i>		
Misi 1	Meningkatkan kondisi Lalu Lintas yang aman, tertib dan terkendali		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kinerja pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang jasa pelayanan transportasi darat	Tercapainya Sarana Prasarana Penunjang Lalu Lintas Untuk Mendukung Kelancaran Lalu Lintas	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi dan terwujudnya prasarana sarana utilitas umum	Pemenuhan sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas
Misi 2	Menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman		
		Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan untuk menunjang keselamatan berlalu lintas	Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha bidang angkutan sebagai upaya mempertahankan tingkat pelayanan, kenyamanan dan keamanan di bidang angkutan
Misi 3	Menyediakan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai		
		Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menunjang keselamatan berlalu lintas	Pemenuhan penyediaan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta



		dan terwujudnya pengelolaan dan pelaporan keuangan	penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas
Misi 4	Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah		
		Meningkatkan penggalian sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah yang didapatkan dari pengujian kendaraan (KIR) dan pengelolaan parkir serta pengelolaan pemakaman
Misi 5	Meningkatkan fasilitas perumahan yang berkualitas dan terjangkau sebagian masyarakat		
Terwujudnya ketersediaan fasilitas perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkualitas	Tercapainya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Meningkatkan sarana dan fasilitas perumahan yang berkualitas dan terjangkau	Peningkatan penataan lingkungan dan fasilitas perumahan melalui pendekatan penataan ruang yang harmonis
Misi 6	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman		
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman
Misi 7	Meningkatkan tertib pertumbuhan perumahan dan permukiman sesuai persyaratan		
		Peningkatan tertib pertumbuhan perumahan dan permukiman sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan	Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan permukiman layak huni
Misi 8	Mendorong memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak		
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak	Meningkatkan pemenuhan penyediaan perumahan / hunian layak huni bagi masyarakat
Misi 9	Meningkatkan Profesionalisme aparat Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman		



		Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetensi di Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar	Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar melalui pendidikan formal maupun pelatihan dan seminar-seminar yang berkaitan dengan bidang perhubungan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman
--	--	--	--



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2013-2018 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

- A. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
 - 1) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman.
 - 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
 - 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
 - 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
 - 3) Program peningkatan pelayanan angkutan.
 - 4) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
 - 5) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
 - 6) Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas
- C. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - 1) Program Pengembangan Perumahan.
 - 2) Program pengelolaan areal pemakaman.
- D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 - 1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- E. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
 - 1) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah



F. Urusan Bersama Penunjang Organisasi

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.2 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar selama 5 (lima) tahun kedepan. Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dinas baru yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 maka penetapan indikator yang ada disesuaikan dengan tahun yang berjalan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya. (Lamp 5.1)



BAB VI
INDIKATOR KINERJA DISHUB PKP YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan sasaran strategis serta program atau kegiatan yang direncanakan dalam pencapaian misi RPJMD Kabupaten Karanganyar, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis dari masing-masing kegiatan untuk lima tahun mendatang telah ditetapkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Karanganyar

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan pada Lalu Lintas	2%	2%	4%	6%	8%	9%	9%
2	Prosentase Rumah Tidak Layak huni (RTLH) yang ditangani	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10%	11,50%	12%	13%	14%	15%	15%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar ini merupakan komitmen Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dan merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018). Oleh karena itu, untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya kesungguhan dan partisipasi serta koordinasi yang sebaik-baiknya dari semua pihak dan terutama jajaran aparatur Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

Perumusan dan penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2018 ini telah diupayakan mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar. Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta tingkat permasalahan di bidang bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, maka rencana strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan pemerintahan khususnya kebijakan bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman.

Demikian Perencanaan Strategis Pembangunan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2018 disusun, dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar

SUNDORO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610512 198812 1 001

TABEL 5.1
REVIEW RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 – 2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
					TAHUN -17		TAHUN -18		
					TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan kinerja pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang jasa pelayanan transportasi darat		Terpenuhinya kinerja pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang jasa pelayanan transportasi darat		Prosentase kinerja pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang jasa pelayanan transportasi darat	61,6%		61,6%		61,6%
	Terwujudnya Sarana Prasarana Penunjang Lalu Lintas Untuk Mendukung Kelancaran Lalu Lintas	Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan pada Lalu Lintas	Program peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas	Prosentase ketertiban dan keamanan pengguna jalan di jalan raya	8%		8%		8%
			- Pengawasan, pemeriksaan dan penindakan kendaraan di ruas jalan	- Jumlah pengawasan, pemeriksaan dan penindakan kendaraan di ruasjalan	24 kali	30.000	24 kali	30.000	24 kali
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	100%	152.000	100%	152.000	100%
			- Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	Jumlah lampu flashing yang terpelihara	20	152.000	20	180.000	50
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas	100%	60.000	100%	80.000	100%
			- Pengadaan APILL	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu flashing	50	60.000	50	80.000	50

			Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prosentase sarana dan prasarana rambu-rambu yang terpelihara	100%	396.640	100%	396.640	100%
			- Rehabilitasi dan perbaikan rambu lalu lintas	Jumlah rambu lalu lintas yang direhabilitasi dan diperbaiki	20 unit	396.640	20 unit	495.526	50 unit
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase sarana dan prasarana rambu-rambu baru yang terpasang	100%	1.250.000	100%	1.100.000	100%
			- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	2.290 unit	1.100.000	2.680 unit	1.100.000	2.680 unit
			- Pengadaan dan pemasangan Running text	Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	8 unit	150.000	8 unit	150.000	8 unit
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	100%	600.000	100%	600.000	100%
			- Pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang melaksanakan uji KIR	8.984	600.000	8.984	600.000	8.984
			Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prosentase rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	100%	140.000	100%	150.000	100%
			- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana alat uji yang terpelihara	9 unit	140.000	9 unit	150.000	9 unit
Mewujudkan ketersediaan fasilitas perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkualitas		Tercapainya ketersediaan fasilitas perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkualitas		Ketersediaan fasilitas perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkualitas	85%		90 %		90 %
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman								
		Prosentase Rumah Tidak Layak huni (RTLH) yang ditangani			85 %		85 %		8
			Program Pengembangan Perumahan	Prosentase pengembangan perumahan	100%	50.000	100%	50.000	100%
			- Identifikasi kawasan	Jumlah penanganan rumah		50.000	1.000	50.000	1.000 unit

			kumuh	tidak layak huni			unit		
		Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)			14%		15%		15%
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase pengelolaan ruang terbuka hijau	100%	1.000.000	100%	1.100.000	100%
			- Pemeliharaan taman dan monument	Jumlah taman dan monument yang terpelihara	14 lokasi	1.000.000	14 lokasi	1.100.000	14 lokasi

Karanganyar, Januari 2017
KepalaDinasPerhubunganPerumahanDanKawasanPermukiman
KabupatenKaranganyar

SUNDORO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610512 198812 1 001